



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

DR. NANI MULYATI, S.H., M.C.L.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

DR. NANI MULYATI, S.H., M.C.L.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Nani Mulyati

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi /Nani Mulyati
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2018.

xxviii, 386 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 353

ISBN 978-602-425-687-6

1. Hukum perusahaan.

I. Judul.

346.066

Hak cipta 2018, pada penulis.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2018.2098 RAJ

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.C.L.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Cetakan ke-1, November 2018

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 082181950029.

DAFTAR ISI

PRAKATA	xi
KATA PENGANTAR	
Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.	ix
SAMBUTAN	
Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR KASUS	xxv
DAFTAR TABEL	xxix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kerangka Teoretis dan Konseptual	17
1. Kerangka Teoretis..	23
2. Kerangka Konseptual	53
BAB 2 SUBJEK HUKUM BUKAN MANUSIA: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN	57
A. Subjek Hukum dalam Pembahasan Teori	58
1. Manusia sebagai Subjek Hukum yang dapat Menjadi Pengemban Hak dan/atau Kewajiban Hukum	58

2. Entitas Bukan Manusia sebagai Subjek Hukum	53
B. Badan Hukum Menurut Hukum Indonesia	104
C. Kategorisasi Korporasi dalam Berbagai Konteks Kepentingan	112
D. Negara sebagai Subjek Hukum	118
E. Subjek Hukum Pidana sebagai Penyandang Hak dan Kewajiban Hukum	124
1. <i>Normadressaat</i> dari Ketentuan Pidana	125
2. Kapasitas Hukum (<i>Legal Capacity</i>) sebagai Syarat untuk Menjadi Subjek Hukum Pidana	131

BAB 3 KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM REZIM HUKUM PIDANA

	137
A. Mengupas Peristilahan Korporasi dalam Hukum Pidana	138
1. Identifikasi dan Analisis Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana pada Undang-Undang Indonesia	138
2. Pengertian Korporasi Menurut Para Ahli	151
3. Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Lain	165
4. Kritisi Terhadap Pengertian Korporasi	169
5. Kesimpulan Mengenai Peristilahan Korporasi	172
B. Bentuk dan Jenis Korporasi yang dapat Dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana	173
1. Korporasi Privat	174
2. Korporasi Publik	190
3. Korporasi Kuasi Pemerintah (<i>Quasi-Governmental Corporation</i>) sebagai Subjek Hukum Pidana	216
4. Partai Politik Sebagai Subjek Hukum Pidana	216

5. Organisasi yang Tidak Berbadan Hukum Sebagai Subjek Hukum Pidana	225
--	-----

BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI 235

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan	235
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	235
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain	257
3. Pertanggungjawaban Pidana Individu Personel Korporasi	261
4. Sanksi Pidana bagi Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan	272
B. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan Pengadilan	283
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan Pengadilan di Indonesia	283
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan Pengadilan di Negara Lain	307
C. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana bagi Subjek Hukum Organisasi yang Tidak Berbadan Hukum	327
D. Prospek Pengembangan Ketentuan tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Masa Depan	333
1. Pembebanan Pertanggungjawaban Pidana Kepada Korporasi	333
2. Pembebanan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengurus Korporasi	337
3. Pertanggungjawaban Pidana bagi Organisasi yang Tidak Berbadan Hukum	340

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

"Buku yang ada di hadapan para pembaca ini merupakan satu karya penting dalam khazanah pengetahuan mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidananya. Tentu saja, jika buku ini sama saja dengan buku-buku lainnya mengenai korporasi, tidak ada hal yang istimewa. Akan tetapi, buku ini justru sangat berbeda dengan buku-buku terdahulu yang membahas tentang korporasi dan pertanggungjawaban pidananya. Melalui penelitian yang sangat mendalam, tekun, detail, dan menggunakan banyak sumber terpercaya dari buku, jurnal, perundang-undangan, putusan pengadilan, materi-materi perbandingan, serta wawancara dengan berbagai narasumber penting, buku ini merupakan suatu karya yang sangat baik. Singkatnya, dengan membaca buku ini, para pembaca akan mendapat pengetahuan, wawasan yang luas dan mendalam tentang seluk beluk korporasi dan pertanggungjawaban pidananya. Hal yang umum dan khusus dibahas dengan menarik dan lengkap. Buku ini penting bagi banyak kalangan, mahasiswa hukum, akademisi, pemerhati hukum, praktisi hukum serta penegak hukum."

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

"Buku yang ditulis Dr. Nani Mulyati hadir untuk ikut memberikan pencerahan akademik tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai aspek. Diskursus para ahli hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah diurai secara lugas dalam buku ini, termasuk di dalamnya analisis tentang praktik perundang-undangan di Indonesia, baik dalam konteks "*ius constitutum*"; "*ius operatum*"; maupun "*ius constituendum*". Dalam pandangan saya selaku seorang akademisi, buku ini sangat berguna tidak saja bagi para mahasiswa hukum dalam berbagai strata; melainkan juga bagi para praktisi hukum, termasuk para perancang perundang-undangan. Oleh karena itu, saya menyambut baik kehadiran buku di tengah para pembaca, dan sekaligus "*appreciate*" terhadap sumbangan pemikiran Dr. Nani Mulyati dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang hukum pidana."

Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

"Buku karya Dr. Nani Mulyati hadir di saat yang tepat, yaitu di tengah diskursus publik ihwal korporasi dan pertanggungjawaban pidananya sedang menjadi isu sentral dalam *design* besar agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain kaya dengan bangunan teori, penulis mengemukakan puluhan putusan pengadilan perihal pertanggungjawaban korporasi. Singkatnya, sebuah karya akademik yang harus dibaca dan ditimbang dalam merumuskan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi ke depan."

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.

Hakim Konstitusi RI dan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Andalas.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM



917860241256876